



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI FIARDI**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **247842**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	334.100.000
1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
98.000.000		
2. MOBIL, FORD EVEREST MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI		
Rp. 130.000.000		
3. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL		
SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI		
1.100.000		
5. MOBIL, FORD EVEREST MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI		
Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	94.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	700.449.776
F. HARTA LAINNYA	Rp.	120.000.000
Sub Total	Rp.	1.248.749.776
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.248.749.776

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.